

ABSTRACT

Taxes have an important role in development. Given the tax functions that are so important, especially the function of budgeters, it is necessary to increase public awareness to pay taxes. Paying taxes is an obligation for the people or society in order to support the continuity of national development. In order to support the above tax policies, several laws and regulations have been enacted in the field of taxation and in the enforcement of these regulations, the provisions of criminal sanctions are provided. Functionalization of criminal sanctions or criminal law is a means of supporting the enforcement of legislation in the field of taxation. So far, when examined the rules of criminal sanctions in the Tax Law has not been functioning properly. This can be seen from the cases that appear not applied criminal sanctions stipulated in the tax law. As a result of the absence of criminal sanctions, legal uncertainty and injustice arise. Therefore, through this research the authors want to reveal the constraints of what causes it and how to overcome it so that the realization of a model of criminal sanctions based on the value of justice in the field of taxation.

The problem in this research is how the formulation policy and the application or application of criminal sanction in the field of taxation, how the constraints that arise in the application or the application of criminal sanctions, and how the reconstruction of criminal sanctions in the field of taxation based on the value of justice.

In this study the authors use a type of normative juridical research that bases secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary data is needed only to support or simply reinforce secondary data. Data analysis is done qualitatively with descriptive and prescriptive decomposition. This is based on the purpose of research which is not only to reveal or describe the data of an sich, but also to reveal the expected formulation of the criminal law.

The results of the research indicate that in the tax law has been formulated acts that can be criminal and accompanied by criminal sanctions, but in its application or its implementation has not run fairly, because if the criminal act committed by taxpayers charged with criminal sanction only perpetrators of tax criminal acts individuals, while the perpetrators of corporate or corporate tax crime have not been touched by criminal sanctions. This can happen because there are obstacles or obstacles in the formulation of criminal sanctions in the tax law. The constraint relates to its material law (legal substance) and its procedural law (formal law). In view of such matters, it is necessary to reconstruct criminal sanctions both legal substance (extension of the meaning of "everyone"), formulation of alternative criminal sanctions and the correct type of criminal sanction for corporations or formal law.

Keywords: *Tax Law, Application of Criminal Sanction, Justice*

ABSTRAK

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Mengingat fungsi pajak yang begitu penting, terutama fungsi budgeter, maka perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi rakyat atau masyarakat dalam rangka menunjang kelangsungan pembangunan nasional. Guna menunjang kebijakan di bidang pajak tersebut di atas telah diundangkan beberapa peraturan perundangan di bidang perpajakan dan dalam penegakan dari peraturan-peraturan tersebut dicantumkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana. Fungsionalisasi sanksi pidana atau hukum pidana ini merupakan suatu sarana pendukung ditegakkannya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selama ini bila dicermati aturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Pajak belum difungsikan dengan baik. Hal ini bisa diketahui dari kasus-kasus yang muncul tidak diterapkan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang pajak. Akibat dari tidak diterapkannya sanksi pidana ini muncul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, maka melalui penelitian ini penulis ingin mengungkapkan kendala-kendala apa yang menyebabkannya dan bagaimana upaya mengatasinya sehingga terwujud model sanksi pidana yang berbasis nilai keadilan di bidang perpajakan.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi dan aplikasi atau penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan, bagaimana kendala-kendala yang muncul dalam aplikasi atau penerapan sanksi pidana, dan bagaimana rekonstruksi sanksi pidana di bidang perpajakan yang berbasis nilai keadilan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mendasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer dibutuhkan hanya untuk mendukung atau sekedar memperkuat data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan penguraian secara diskriptif dan preskriptif. Hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya untuk mengungkapkan atau menggambarkan data *an sich*, melainkan juga mengungkapkan formulasi hukum pidana yang diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam undang-undang pajak telah dirumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan disertai sanksi pidananya, namun dalam aplikasinya atau penerapannya belum berjalan secara adil, karena apabila tindak pidana dilakukan oleh wajib pajak yang dijerat sanksi pidana hanya pelaku tindak pidana pajak perorangan, sementara pelaku tindak pidana pajak badan atau korporasi belum tersentuh sanksi pidana. Hal ini bisa terjadi karena ada kendala atau hambatan dalam perumusan sanksi pidana dalam undang-undang pajak. Mengingat hal yang demikian, maka perlu direkonstruksi sanksi pidananya dalam undang-undang pajak.

Kunci: Hukum Pajak, Penerapan Sanksi Pidana, Keadilan